

KEKEJAMAN KKB PAPUA YANG MELANGGAR HAM

Muhammad Andi Septiadi¹⁾ Nazzira Gahitsya Sofa²⁾ Siti Syarah³⁾ Wanda Shakira⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Septiadi.andi90@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The number of cases of violations of Human Rights (HAM) committed by a group of terrorists in Papua (KKB) is certainly a cause of fear for Papuans and other Indonesians. If it is not stopped, there will be more casualties caused by this group. The case of human rights violations committed by the Papuan KKB is still a topic of discussion among the wider community. We know that the role of the Government, TNI and Polri is very important in overcoming this conflict. Here we will discuss about the cruelty of the Papuan KKB which violates human rights. The reason is none other than to provide input to the party who is obliged to resolve this case.

Keywords : Cruelty, Violations, OPM, TNI-Polri

ABSTRAK

Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh sekelompok teroris di Papua (KKB) ini tentunya membuat ketakutan tersendiri bagi warga Papua dan masyarakat Indonesia lainnya. Jika tidak dihentikan maka akan semakin banyak korban jiwa yang diakibatkan oleh sekelompok tersebut. Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan KKB Papua ini masih saja menjadi perbincangan dikalangan masyarakat luas. Kita tahu bahwasannya peran Pemerintah, TNI dan Polri sangat penting dalam menanggulangi konflik ini. Disini kami akan membahas mengenai Kekejaman KKB Papua Yang Melanggar HAM. Adapun alasannya tidak lain untuk memberi masukan kepada pihak yang berkewajiban untuk menyelesaikan kasus ini.

Kata Kunci: Kekejaman, Pelanggaran, OPM, TNI-Polri

PENDAHULUAN

Istilah Separatis atau separatisme ditunjukkan pada sebuah paham atau gerakan sekelompok orang yang menginginkan kedaulatan dan memisahkan diri dari suatu wilayah, tujuan dari gerakan memisahkan diri antara lain untuk merdeka dan mendapatkann kedaulatannya sendiri untuk menjadi sebuah negara baru. Seperti gejolak separatisme yang terjadi di papua barat oleh KKB papua, hingga saat ini gerakan yang dilakukan oleh KKB papua masih menjadi momok tersendiri bagi masyarakat sana. Muncul nya hal ini diawali oleh pengakuan menteri luar negeri belanda yang menyampaikan resolusi tentang membebaskannya irian barat dengan mendirikan negara papua di dewan keamanan PBB. ¹Banyak dari masyarakat Indonesia yang marah akan hal ini, karna sama-sama dijajah oleh belanda saat itu, masyarakat Indonesia menganggap bahwa Papua juga adalah bagian dari Indonesia. secara tidak langsung bahwa Belanda sendiri telah menanamkan benih-benih separatisme kepada papua sejak awal 1950-an. Hingga saat ini separatisme yang dilakukan oleh KKB papua masih terjadi dan menjadi konflik perbincangan bagi masyarakat . Maka dari itu Negara harus melakukan penghentian sebagai salah satu cara dalam menegakkan hukum Indonesia.¹

Kasus kekejaman yang dilakukan oleh KKB telah terjadi di berbagai kota termasuk pembunuhan dua guru SD dan SMP di kota Juguloma, wilayah Omukia, memakan helikopter, melukai seorang wanita dengan senjata tajam, kemudian, baku tembak antara Paskhas dan KBB di Amingganu Bandara. Apalagi selama 10 tahun terakhir pelaku kebiadaban di Papua paling banyak dilakukan oleh hubungan keluarga dengan 118 kasus, berbeda dengan TNI dengan 15 kasus, dan Polri dengan 13 kasus. Korban yang meninggal akibat kekejaman yang terjadi dengan jumlah 356 orang tersebut adalah masyarakat biasa serta TNI dan Polri sebanyak 93% dan 7 persen orang dari KBB.²

Penelitian terdahulu oleh Sutjamiko (2001) bahwa faktor dominan yang berpengaruh terhadap keberhasilan gerakan separatism ada dua, kekuasaan dalam maupun luar negeri merupakan faktor pertama, dan dukungan internasional merupakan faktor kedua. Ada empat variable separatism di Papua Barat, yang pertama pemerintah pusat dan pihak internasional tidak memberikan dukungan, kedua adanya penolakan dari pihak tersebut, dan keempat gerakan separatism didukung oleh pemerintah dan pihak internasionalI agar daerah tersebut melepaskan diri, ketiga adanya dukungan gerakan separatism di daerah tesebut. Kasus Papua Barat ini tergolong variable pertama, karena pemerintah Indonesia tidak mengizinkan agar Papua Barat melepaskan diri dari Indonesia, akan tetapi pihak Internasional juga mendukung agar daerah tersebut tetap berintegrasi dengan Indonesia. Widjojo (2009) melakukan usaha membatasi penduduk asli Papua,

pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan dan proses integrasi Papua dalam Indonesia yang bermasalah merupakan sumber konflik di Papua yang dikemukakan oleh LIPI. Widjojo (2009) Wospakrik (2016) pemerintah pusat merumuskan kebijakan yang sesuai yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 mengenai pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Peniai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong yang memecah Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Irian Jaya bagian Timur, Tengah dan Barat sebagai solusi untuk penanganan konflik Papua, akan tetapi hal tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat Papua dan dianggap gagal total. Penelitian tersebut masih kurang karena kasus KKB Papua tak kunjung usai hingga saat ini, apa yang dilakukan oleh KKB Papua merupakan suatu pelanggaran HAM yang membuat masyarakat resah. Permasalahan mengenai KKB Papua ini merupakan permasalahan lama namun tak kunjung usai. Maka dari itu kami melakukan penelitian ini agar permasalahan KKB Papua yang dimana menewaskan banyak orang agar diselesaikan yang dimana pemerintah harus turun tangan langsung menangani kasus ini, pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menegakkan, melindungi, memenuhi, menghormati dan memajukan HAM. Negara memiliki peran utama apabila terjadi pelanggaran HAM.³

Dapat disimpulkan bahwa kami melakukan penelitian ini agar pemerintah menghentikan kasus KKB Papua, karena pemerintah berkewajiban dalam menangani kasus ini. Adapun perundang-undangan terkait HAM sebagai berikut :a. UUD 1945 : Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1 dan 2, Pasal 28 ayat 1, 2, dan 5, Pasal J ayat 1 dan 2 b. UU HAM : Pasal 1 angka 1 dan 5, Pasal 2, Pasal 3 ayat 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat 3, Pasal 52 ayat 1 dan 2, dan Pasal 67 c. UU Pengadilan HAM : Pasal 1 ayat 1⁴

METODE PENELITIAN

Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan KKB Papua ini tentunya ketakutan tersendiri bagi warga Papua dan masyarakat Indonesia, jika tidak dihentikan maka akan semakin banyak korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM yang dilakukan KKB Papua ini masih saja menjadi perbincangan dikalangan masyarakat luas. Kita tahu bahwasannya pemerintah harus turun tangan langsung untuk meneliti kasus yang sedang terjadi di Papua, Indonesia. Oleh karena itu, kami mencoba meneliti kasus ini, namun penelitian ini tidak bisa saya lakukan secara langsung dikarenakan mengalami angka covid sedang naik-naiknya, maka dari itu saya alihkan penelitian ini secara online. Adapun alasan penelitian ini, tidak lain untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kasus KKB di Papua dan mengapa pemerintah tidak langsung menangani kasus ini, karna kasus ini sudah lama terjadi dan tak kunjung usai. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian

ini tentu nya kita mencari tau tentang pelanggaran HAM yang dilakukan KKB Papua dan sebab apa sebab terjadinya. Lalu mencari fakta dan data untuk dianalisis, serta tanggapan pemerintah tentang kasus ini. Jika hasil penelitian sudah terkumpul semua, setelahnya kita akan membuat kesimpulan terhadap penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian mixmethod kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan bila menggunakan salah satu pendekatan saja.⁵ Oleh karena itu, Sugiono memaparkan bahwa focus dari penelitian ini adalah pada prosesnya dan pada pemaknaan hasilnya. Penelitian ini tidak bisa saya lakukan secara langsung dikarenakan mengalami angka covid sedang naik-naiknya, maka dari itu saya alihkan penelitian ini secara online. Penelitian ini dapat dilakukan dengan mencari fakta dan data atas kasus kekejaman yang dilakukan oleh kelompok Kriminal bersenjata di papua. Metode observasi yang akan kita gunakan untuk penelitian ini adalah observasi tidak langsung karena penelitian yang kami lakukan bersifat pengamatan atau mencatat suatu masalah atau peristiwa, dan bisa dicari sumber datanya lewat media social mengenai peristiwa KKB di Papua.

Dengan adanya kasus kekejaman KKB ini saya menggunakan teori Positivisme, yang mana teori ini satu-satunya hukum yang shahih yaitu perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas. Dengan cara inilah suatu system yang rasional yang terdiri dari aturan-aturan yang saling berkaitan dapat dikonfirmasi. Dalam pandangan John Austin hak barulah muncul jika da aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka. Dalam pandangan teori positivism hal barulah ada jika hukum yang telah mengaturnya. Kualitas etis juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. ⁶Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati bila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara, dan yang paling unggul dalam pandangan ini ialah memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.. Sementara itu, kelompok minoritas yang kecenderungannya tidak dapat diabaikan oleh individu-individu yang dapat mengabaikan dan kehilangan kebebasannya.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yang berhubungan dengan penelitian terdahulu, seperti: Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap HAM yang dilakukan Oleh KKB di Papua oleh Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat; Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok KKB Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional oleh Muhammad Hafiz dan Surya Mulia Pratama; Optimalisasi Sinergitas Polri dan Kementerian/Lembaga Dalam Penanggulangan Kelompok Teroris Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI oleh Rantau Isnur Eka, Rizerius Eko Hadisancoko, dan Lukman Yudho Prakoso.

Selain dari sumber penelitian terdahulu, bahan sekunder yang digunakan untuk penelitian ini yakni, bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari hasil penelitian terkait, tulisan atau karya-karya dari kalangan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil wawancara

Berdasarkan penelitian yang kami peroleh melalui wawancara dari beberapa narasumber yang berlatar belakang di dunia pendidikan sehingga data yang dihasilkan dalam penelitian ini akurat, maka menghasilkan jawaban sebagai berikut :

Menurut mika "alasan terjadinya KKB di Papua yaitu krn ingin memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri, pemerintah harus lebih mempertegas ketentuan hukum bagi pelanggaran HAM dan penyebab susah nya penegakan hukum memeberantas KKB di Papua ini adalah kurang faktor perlindungan dari tokoh-tokoh lokas, dan kurangnya koordinasi antar tim. menurut saya, maka solusi yang harus diberikan pemerintah utk kkb ini adalah pemerintah harus melakukan pendekatan tanpa adanya unsur kekerasan utk bisa mendapatkan jln keluar agar konflik ini terselesaikan. saran saya, yang harus pemerintah lakukan sama seperti diatas yaitu pemerintah hrs bisa melakukan pendekatan dengan cara komprehensif dan mencari titik akar permasalahan tanpa adanya kekerasan"

2. Hasil Kuisisioner

Tabel 1. Deskripsi Responden Penelitian

Data Responden Berdasarkan Asal Daerah		
Kabupaten	Jumlah	Presentase
Bandung	37	37%
Majalengka	22	22%
Banten	6	6%
Sumedang	26	26%
Jakarta	9	9%
Total	100	100%
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin		
Jenis kelamin	Jumlah	Persentase

Laki-Laki	54	54%
Perempuan	46	45%
Total	100	100%
Data Responden Berdasarkan Umur		
Umur	Jumlah	Persentase
18	9	9%
19	59	59%
20	24	24%
21	8	8%
Total	100	100%

Berdasarkan tabel 1 diatas, diperoleh hasil data dari kuisisioner kami bahwa sebagian besar responden berasal dari kota Bandung dengan persentase 37% dan sisanya kota lainnya. Responden kuisisioner kami didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan perbandingan yang tidak jauh dengan jenis kelamin perempuan, yaitu persentase sebesar 54% banding 45%. Responden kuisisioner kami berusia 18-21 tahun dengan persentase terbanyak yaitu 59% responden berumur 19 tahun, sedangkan persentase yang paling sedikit berumur 21 tahun sebanyak 8%.

Tabel.2 Mengetahui Kasus Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua

Mengetahui Kasus KKB	Jumlah	Persentase
Tahu	93	92,1%
Tidak Tahu	8	7,9%

Berdasarkan data dari tabel 2, responden mengetahui adanya kasus Kekejaman bersenjata di Papua dengan persentase 92,1%. Sedangkan yang tidak mengetahui kasus ini mendapat persentase yang paling rendah yaitu hanya sebanyak 7,9%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui atau mengikuti berita tentang kasus kelompok criminal bersenjata di papua.

Tabel.3 Menetapkan Label Teroris Kepada KKB di Papua

Label Teroris	Jumlah	Persentase
Setuju	89	87,3%
Tidak Setuju	13	12,7%

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel.3 para responden cenderung lebih menyetujui apabila KKB ini diberi label Teroris dikarenakan persentase yang didapat sangat tinggi yaitu 87,3%. Sedangkan responden yang tidak menyetujui hanya dengan dengan persentase 12,7%.

Tabel.4 Adanya Pemeliharaan Mental Anak-anak Yang Merasakan Ancaman

Bimbingan	Jumlah	Persentase
Iya	94	92%
Tidak	8	7,8%

Perlindungan dan pemulihan mental anak-anak terutama yang diwilayah Papua yang merasakan ancaman, tekanan dan teror itu memang sangat diperlukan. Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel.4 92% responden yang menyetujui adanya rehabilitas atau perlindungan. Sedangkan 7,8% responden yang tidak menyetujui adanya pemulihan mental anak-anak yang berada di Papua.

Tabel.5 Pendekatan Dengan Cara Pertukaran Gagasan

Pendekatan	Jumlah	Persentase
Setuju	76	74,5%
Tidak Setuju	26	26,5%

Data yang disajikan pada tabel.5 menunjukkan bahwa sebanyak 74,5% menyetujui bahwa adanya pendekatan keamanan di papua dilakukan dengan lebih mengedapankan pertukaran kata dan gagasan bukan melalui pertukaran peluru, melalui sebuah perundingan yang humanis antara pemerintah dan KKB, juga melakukan pendekatan kepada masyarakat agar pasukan kkb tidak bertambah dan masyarakat papua tidak merasa trasingkan oleh pemerintah. Sedangkan 25,5% responden tidak menyetujui dikarenakan dengan cara lemah lembut hal yang mustahil untuk berhasil mengusir kelompok tersebut. Tiada lain adalah dengan cara sebaya yang telah dilakukan oleh oknum terhadap bangsa, ketika KKB memerangi maka kita pun sama memerangi balik mereka.

Tabel.6 Bekerjasama Dengan Kominham Agar Tidak Mengabaikan Bukti Dari Dampak KKB

Bekerjasama	Jumlah	Persentase
-------------	--------	------------

Setuju	96	94,1%
Tidak Setuju	6	5,9%

Tabel.6 menyajikan data bahwa sebanyak 94,1% setuju apabila kominham tidak mengabaikan bukti dari dampak KKB. Sedangkan responden 5,9% kurang setuju bahwa kominham mengabaikan tugasnya sebagai perlindungan ham.

Tabel.7 Adanya Penegakan Hukum dan Ditindak Lanjuti Oleh Jajaran Polri

Penegakan Hukum	Jumlah	Persentase
Setuju	94	92,2%
Tidak Setuju	8	7,8%

Pada tabel.7 menyajikan data bahwa sebanyak 92,2% responden setuju bahwa penerapan norma hukum harus dipertegas mengenai kelompok sparatis ini, penindakan harus secara intens dilakukan oleh polri maupun TNI kepada KKB. Pemerintah harus lebih represif untuk menghadapi KKB mengerahkan anggota TNI dalam skala besar, bergerak cepat untuk memberantas kkb dengan menggunakan tindakan preventif dengan memerhatikan asas kemanusiaan dan keadilan.. Sedangkan responden dengan persentase 7,8% yang tidak mendukung dengan adanya penegakan hukum yang harus diterapkan bagi KKB.

Tabel.8 Hukum harus Ditegakkan Agar Masyarakat Percaya Kepada Jajaran Porli

Kepercayaan	Jumlah	Persentase
Iya	94	92,2%
0-Tidak	8	7,8%

Pada tabel.8 menyajikan data bahwa jumlah agar masyarakat kembali percaya kepada pemerintah, jajaran Porli maupun TNI agar segera melakukan pemburuan penangkapan terhadap kkb sampai tuntas dengan persentase 92,2%. Sedangkan responden dengan persentase 7,8% yang tidak percaya kepada porli sepenuhnya karena sebenarnya pemerintah bisa mengutus perwakilan siapapun itu yang dapat menyelesaikan atau mengurangi permasalahan kasus ini.

Tabel.9 Dampak Buruk Bagi Psikologis Masyarakat Di Papua

Dampak	Jumlah	Persentase
Iya	73	71,6%

Tidak	2	2%
Mungkin	27	26,5%

Pada tabel.9 responden dapat memilih jawaban lebih dari satu, sehingga didapatkan hasil bahwa dampak buruk yang dirasakan bagi masyarakat dengan persentase 71,6%, kemudian persentase terendah yaitu 2% yang tidak merasakan dampak dari kkb ini, selanjutnya dalam hal yang mungkin saja hal ini dapat mengganggu psikologis masyarakat yang berada di papua dengan persentase 26,5%.

Tabel.10 Melepaskan Papua dari Bagian Wilayah Indonesia

Melepaskan Papua dari Negara Indonesia	Jumlah	Persentase
Setuju	21	20,8%
Tidak Setuju	80	79,2%

Dari tabel.10 menyajikan hasil responden untuk mengikuti keinginan papua memisahkan diri dari NKRI karena sudah banyaknya pahlawan yang gugur, dan jika tidak diperhatikan maka akan menambah korban yang tak bersalah yaitu persentase 20,8%. Sedangkan responden yang tidak menyetujui apabila papua memisahkan diri dari Indonesia sangat banyak dengan persentase 79,2%. Mencari solusi tanpa harus merugikan masyarakat papua, bernegosiasi agar bisa mengambil tindakan demi kepentingan dua belah pihak, dan kita bisa membentuk team untuk bisa focus mengurus permasalahan KKB yang ada di papua.

Tabel. 11 Kasus Kekerasan di Papua Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Tewas Masyarakat Sipil	Korban Tewas Aparat
2014	2	4	2
2015	4	1	5
2016	4	6	1
2017	9	0	3
2018	7	4	3

Pada tahun 2018 akhir, tepatnya 2 Desember 2018 terjadi peperangan yang mematikan yang dilakukan oleh kelompok KKB Papua terhadap pada pembangunan Trans Papua. Peristiwa tersebut memakan 31 orang pekerja. Selain itu, pada 25 April 2021 kekejaman KKB Papua mengakibatkan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur tertembak di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, tanggal 26 Maret 2022 TNI bernama Letnan Dua Marinir Mohamad Iqbal dinyatakan gugur akibat serangan dari KKB Papua sementara anggota TNI lainnya mengalami luka ringan hingga berat dan masih banyak lagi korban akibat kekejaman KKB Papua.

3. Hasil observasi

Dengan pengamatan kami bahwa maraknya berita tentang KKB akhirnya kita menyongsong penelitian ini kepada penegakan hukumnya yang melanggar HAM. Munculnya hal ini diawali oleh pengakuan menteri luar negeri yang menyampaikan bahwa membebaskan Papua dengan cara mendirikan negara Papua dikeamanan PBB. Namun hal ini masyarakat Indonesia menolak mentah karena mereka pun sama mereskaan dijajah oleh bangsa Belanda dan tidak setuju bila Irian Barat memisahkan wilayahnya dari bagian Indonesia. Ternyata pada saat itu bangsa Belanda telah mendoktrin masyarakat Papua separatisme dan diimplementasikan hingga saat ini yaitu munculnya KKB di Papua. Lalu mulailah kasus ini berawal dari pembunuhan terhadap keluarganya sendiri dengan banyaknya kasus pembunuhan hubungan keluarga yaitu 118 kasus.

Dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses penanganan di Indonesia ini setidaknya diakibatkan oleh tiga faktor. **Pertama**, adalah terkait regulasi atau instrument hukum yang memang memungkinkan bagi aparat untuk menggunakan *hard power* dalam menghadapi terorisme, **kedua**, minimnya kesadaran pengaplikasian serta minimnya pemahaman terkait nilai-nilai HAM bagi kalangan aktor keamanan di Indonesia, **ketiga**, adanya anggapan dari masyarakat di Indonesia bahwa yang disebut sebagai teroris seolah-olah layak untuk diperlakukan semena-mena oleh aparat keamanan dan tidak mendapatkan perlindungan haknya sebagai manusia (Kusuma, 2018b).

Kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan OPM sebagai organisasi teroris konflik antara OPM dengan pemerintah Indonesia telah berlangsung puluhan tahun. Setidaknya OPM resmi didirikan pada tahun 1965, baik dari pihak militer Indonesia maupun dari pihak OPM yang saling melakukan serangan bersenjata mengakibatkan korban jiwa dari kedua belah pihak.

Selama konflik berlangsung, pemerintah Indonesia menganggap OPM sebagai organisasi kriminal yang dianggap mengganggu nasional. Namun kemudian status tersebut berubah menjadi organisasi teroris. Perubahan status tersebut diumumkan oleh pemerintah melalui menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Alasan utama dari pemerintah Indonesia

terkait keputusan untuk merubah kelompok teroris karena OPM dianggap telah melakukan pembunuhan dan melakukan tindakan kekerasan secara massif. Kesimpulan untuk menentukan OPM menjadi organisasi teroris ini, karena sudah banyak pertimbangan serta masukan dari pemimpin lembaga Negara. Serta menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan serta pembunuhan secara massif sudah memenuhi syarat untuk masuk ke pada organisasi teroris. Bahkan tidak jarang OPM menjadikan masyarakat sipil di Papua menjadi target kekerasan mereka terutama kelompok masyarakat yang pro terhadap pemerintah Indonesia.

Dari keterangan yang diberikan oleh badan intelejen Negara (BIN) menjelaskan bahwa OPM telah berkali-kali melakukan serangan dan beberapa kali menembak mati masyarakat sipil yang kemudian diklaim bahwa yang ditembak tersebut adalah masyarakat sipil yang menjadi mata-mata dari tentara nasional Indonesia. Hal ini tentu membuat keadaan yang sangat meresahkan di wilayah Papua. Kegiatan masyarakat sipil dalam menjalankan kehidupan sehari-hari menjadi terganggu karena kondisi konflik yang terjadi antara OPM dan pemerintah Indonesia.

Discussion

Sinegritas TNI dan Polri Dalam Menanggulangi KKB Papua Guna Mewujudkan NKRI

- **Bagaimana kelompok KKB ini terbentuk**

Perjuangan OPM dalam melepaskan diri yang kerap kali melakukan gerakan kriminal dan menyebabkan korban jiwa, oleh sebab itu pemerintah berinisiatif membentuk otonomi khusus dengan anggaran yang besar bagi Papua. Namun sangat disayangkan anggaran itu tidak sampai ke masyarakat luas, sebab hanya dinikmati oleh golongan elite saja. Hal ini membuat geram dan memicu adanya gerakan perlawanan massif yang dilakukan OPM, dengan cara melakukan berbagai tindak kejahatan dan kerap kali memakan jiwa.

Sejak awal kemerdekaan, ada beberapa organisasi yang bermunculan serta mengganggu stabilitas Indonesia sebagai Negara berdaulat seperti DI/TII yang berada di Makasar, GAM di Aceh, selain itu juga KKB di Papua yang sekarang sedang diteliti. Dalam pergolakan ini NKRI tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, mengingat pembentukan NKRI juga didasari oleh upaya perlawanan dari berbagai daerah, oleh sebab itu sudut pandang harus benar-benar ditegakan.

Dari berbagai persoalan yang terjadi di Papua dan beberapa uraian mengenai pendekatan yang dapat dilakukan tersebut, maka dapat diteliti bahwa sinegritas antar lembaga terkait Polri dan TNI merupakan suatu yang diperlukan di Papua.

Meskipun nama OPM sudah lama hilang, namun perlawanannya masih berlanjut dengan sebutan kkb Papua, dimana jejaknya diteruskan oleh beberapa orang yang masih menyisahkan luka lama.

- **Kasus kejahatan yang diakibatkan oleh KKB Papua**

Kelompok kriminal bersenjata yaitu suatu kelompok di wilayah Papua yang melakukan aksi teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. OPM selalu menyuarakan agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri.

Setelah pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris, menurut kami ini merupakan langkah yang berbahaya. Bahwasannya Negara tidak dapat menetapkan OPM atau KKB sebagai organisasi teroris, sebab hal itu dapat memperkeruh kondisi dan bukan jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Rentetan peristiwa kekerasan di Papua tidak pernah berhenti. Selama 2021, KKB melakukan aksinya kembali sebanyak 92 kali, korban jiwa sebanyak 33 orang. Sejauh ini kami beranggapan bahwa pemerintah hanya menyatakan bahwa kondisi keamanan di Papua tetap tertib sipil dan negara tidak pernah secara jelas mengumumkan situasi keamanan di Papua.

Dari analisis kami, kami berpendapat bahwa pemerintah belum sepenuhnya melakukan ancaman yang humanistik. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua masih dengan cara kekerasan. Kami menganggap perubahan status KKB dan OPM ini sebagai salah satunya. Pemerintah harus berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk mencari solusi yang ideal untuk penyelesaian konflik. Tujuannya agar konflik di Papua segera diakhiri, segala kekerasan dan hal lainnya, sehingga tidak ada lagi korban.

- **Dampak kejahatan kkb dan solusi untuk menanganinya**

Meningkatkan peran TNI-PORLI dalam menangani masalah Papua ini, khususnya dalam bidang akademisi yaitu dengan memperluas pemahaman yang sama tentang upaya menangani kasus kkb di Papua juga memperluas sinergitas kerja sama gagasan fungsional yang dimiliki team TNI-PORLI melalui pendalaman mekanisme pelaksanaan koordinasi, penggunaan pendekatan *soft power* melalui pelurusan sejarah masuknya Papua ke Indonesia. Kemudian, harus adanya upaya bersama tugas TNI-PORLI dengan lembaga-lembaga sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Mengingat tugas TNI-PORLI ini sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu terkenal dengan keterampilan dalam penyelidikan yang cepat dan tepat ketika dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, potensi ini harus diupayakan demi menjaga keutuhan NKRI yang aman dan masyarakat yang sejahtera. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yaitu pihak kepolisian bisa mengambil sikap represif dengan catatan menghindari adanya pelanggaran HAM, apabila kondisinya makin memuncak maka team kepolisian dapat menghubungi team TNI untuk memberikan bantuan tambahan kekuatan.

Perintah pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Nemangkawi 2019, dalam penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh KKB. Adanya pembagian tugas surat pemerintah yang menugaskan 764 personel, diantaranya 60 personel (rendalops), 57 personel bertugas di (satgasops), yang bertugas intelejen ada 10 orang lalu 18 personel sebagai sub satgas politik, 26 personel sebagai satgas militer, satgas binmas noken sebanyak 71 personel, lalu ada satgas penegakan hukum sebanyak 208 personel yaitu (monitoring center, investigasi, analisis dll), satgas humas ada 36 personel dan yang terakhir 324 brimob yang bertugas di satgas penindakan.

Ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari TNI dan Polri, dimana upaya kerjasama diantara keduanya adalah tonggak awal keberhasilan operasi yang sedang ditugaskan. Dimana, pihak kepolisian dan tni juga mempunyai kemampuan yang saling melengkapi dalam konteks penanganan kelompok kriminal bersenjata di Papua.

KESIMPULAN

Pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat menentukan kemana arah kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua, karena jika masyarakat sejahtera maka dapat dipastikan tingkat kejahatan akan berkurang dan yang terakhir komunikasi dengan tokoh masyarakat yang berada ditempat itu akan lebih mudah dimana saran dan pendapatnya didengar dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hal inilah yang sangat berarti bagi upaya atau penanggulangan KKB di Papua. Berdasarkan pada proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa factor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang berkelanjutan juga diharapkan adanya tambahan variable lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini. Untuk itu Kami merekomendasikan buku yang berjudul konflik Pemekaran wilayah di Tanah Papua dan jurnal pendidikan kewarganegaraan untuk membantu pengetahuan pembaca akan jurnal kita.

DAFTAR PUSTAKA

Sefriani S. Separatisme dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua

Merdeka. *Unisia*. 2003;26(47):41-53. doi:10.20885/unisia.vol26.iss47.art5

Jaleswari. Data dan Fakta KKB Papua adalah Organisasi Teroris Menurut Pemerintah. *suarasulsel.id*. Published 2021. <https://sulsel.suara.com/read/2021/05/01/050000/ini-data-dan-fakta-kkb-papua-adalah-organisasi-teroris-menurut-pemerintah?page=all>

Rachman T. 濟無No Title No Title No Title. *Angew Chemie Int Ed* 6(11), 951–952. 2018;7(1):10-27.

Sianturi BH, Hanita M. Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua) Pendahuluan Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian aman dan damai . *J keamanan Nas*. 2020;VI(1):73-94.

Kaisupy DA, Maing SG. Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *J Ilmu Sos dan Hum*. 2021;10(1):82. doi:10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056

RAHADEN LINGGA BHUMI. PERAN ETIKA DALAM PELAKU KASUS PEMBUNUHAN PEKERJA PROYEK JEMBATAN DI PAPUA OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB)No Title. *Univ Katolik Widya Mandala Madiun*. Published online 2018.

Edon SFL, Hidayat NA. Kewajiban Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua. *J Pendidik Kewarganegaraan Undiksha*. 2021;9(3):854-869. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/39160/19444>